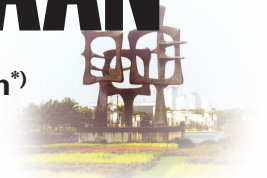


PROBLEM AIR BERSIH DI PERKOTAAN

Rohani Budi Prihatin^{*)}



Abstrak

Kerusakan lingkungan telah menyebabkan sumber daya air di perkotaan makin tercemar. Krisis air disebabkan pertumbuhan penduduk, lemahnya pelayanan PDAM, dan pergantian musim yang kontras. Krisis air bersih berpotensi menyebabkan konflik sosial, terutama ketika semakin banyak warga miskin yang kehilangan akses terhadap air. Oleh karena itu, Pemerintah harus melakukan intervensi yang tegas dengan melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah yang ketat, pembangunan, perbaikan kualitas dan tata guna air, mendorong pengguna air membiayai pengadaan air bersih dan mewajibkan pembuatan sumur resapan di setiap bangunan.

A. Pendahuluan

Krisis air bersih mulai mencuat 6 bulan belakangan ketika pasokan air tidak memenuhi kebutuhan warga di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Tidak hanya warga pengguna dan pemerintah, namun juga PDAM selaku penyedia yang direpotkan. Pedagang keliling juga mengalami kesulitan karena permintaan terus melonjak, sementara sumber air justru terbatas.

Cadangan air Indonesia mencapai 2.530 km³/tahun yang termasuk dalam salah satu negara yang memiliki cadangan air terkaya di dunia. Dalam data lain menunjukkan, ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.500 m³ per kapita per tahun. Angka ini masih jauh di

atas ketersediaan air rata-rata di dunia yang hanya 8.000 m³ per tahun. Meskipun begitu, Indonesia masih mengalami kelangkaan air bersih, terutama di kota-kota besar. Menurut Pakar hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, Jakarta sudah mengalami krisis air bersih sejak 18 tahun yang lalu, dan saat ini kondisinya semakin parah. Jakarta memerlukan sekitar 26.938 liter air per detik, namun yang tersedia hanya 17.700 liter air per detik. Selain itu, menurut laporan Kelompok Kerja Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Indonesia, ketersediaan air di Pulau Jawa hanya 1.750 m³ per kapita per tahun pada tahun 2000 dan akan terus menurun hingga 1.200 m³ per kapita per tahun pada tahun 2020. Padahal standar kecukupan minimal adalah 2.000 m³ per kapita per tahun.

^{*)} Peneliti bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: rohbudbud@gmail.com



Berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air, dari sisi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, akhirnya menempatkan Indonesia pada kelompok peringkat rendah dalam pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs).

B. Penyebab Krisis Air Bersih

Ada berbagai penyebab krisis air bersih di kota-kota besar di Indonesia. *Pertama*, permasalahan kependudukan. Faktor-faktor yang terkait dengan penurunan kualitas air di antaranya: (1) Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk ke perkotaan yang cukup tinggi; (2) Penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah dan air. Pembangunan gedung-gedung di kota besar banyak yang tidak mematuhi perbandingan lahan terpakai dan lahan terbuka, sehingga mengganggu proses penyerapan air hujan ke dalam tanah; (3) Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dan aktivitas domestik, industri, erosi, dan pertanian; dan (4) Eksploitasi air tanah yang berlebihan yang dilakukan oleh gedung-gedung perkantoran, rumah sakit, pusat perbelanjaan, apartemen, pengusaha *laundry*, dan bangunan lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berpotensi pula menambah kotoran dan polusi terhadap sumber-sumber air bersih yang ada, seperti air tanah dan air permukaan di perkotaan (Uitto dan Biswas, 2000). Badan air seperti sungai, selokan, rawa, dan danau di kota besar masih terus-menerus dijadikan lokasi akhir pembuangan sampah dan mengalirkan limbah yang pada akhirnya terakumulasi di laut. Di kota-kota besar, sumber air baku umumnya dicemari oleh limbah industri. Ekspedisi *Kompas* (2009) yang menyusuri Sungai Ciliwung misalnya, menemukan fakta bahwa industri tumbuh subur di sepanjang tepian Ciliwung dan sejumlah percabangannya. Akibatnya kualitas air Ciliwung menurun dan tidak bisa digunakan sebagai air baku untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jelas bahwa perilaku manusia yang kurang terarah dan kurang bersahabat dengan lingkungan berpengaruh terhadap kualitas air.

Kedua, masih kecilnya cakupan pelayanan PDAM keseluruh pelosok Indonesia. Secara umum, pelayanan air bersih di perkotaan di

Indonesia sampai tahun 2000 baru mencapai 39% atau 33 juta penduduk, yang berarti bahwa sekitar 119 juta penduduk belum memiliki akses terhadap air bersih.

Pada saat ini, kinerja pelayanan air bersih di kawasan perkotaan masih sangat kurang terutama di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Sebagai contoh, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan kota metropolitan, pada tahun 2012 jumlah penduduk yang terlayani air bersih baru sekitar 61,06% (PDAM Provinsi DKI Jakarta, 2012).

Ketiga, pengaruh pergantian musim yang menyebabkan pasokan air tidak merata. Pergantian antara musim hujan dan musim kemarau di Indonesia terlihat menjadi sangat kontras di mana pada musim hujan terjadi banjir tapi pada saat musim kemarau krisis air bersih. Jakarta merupakan salah satu contoh kawasan perkotaan yang kontras pada kedua musimnya. Tingginya pertumbuhan penduduk menuntut besarnya penyediaan air bersih. Ironisnya, di tengah ancaman kelangkaan air tersebut, potensi air hujan di Jakarta yang mencapai 2.000 juta m³/tahun tidak teresap optimal karena hanya 26,6% yang teresap ke dalam tanah dan sisanya 73,4% terbuang sia-sia ke laut.

C. Potensi Konflik Sosial

Menurut Swyngedouw (2004), kesuksesan sebuah kota sangat tergantung dari kemampuannya mengatasi problem lingkungan hidup, khususnya dalam penyediaan air bersih. Tanpa peran campur tangan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam pengelolaan akses terhadap air bersih, maka dipastikan nasib kota-kota besar akan berpotensi konflik sosial yang diakibatkan akses air bersih.

Kekhawatiran semacam ini tidak hanya didasari oleh asumsi semata. Studi yang dilakukan Wirsing, Stoll, dan Jaspardo (2013) berjudul *International Conflict over Water Resources in Himalayan Asia* menyimpulkan bahwa sumber mata air di Pegunungan Himalaya yang mengalir ke beberapa negara di Asia Tengah akan berpotensi memunculkan konflik antarnegara. Studi ini juga sekaligus memperkuat studi Stoll (1988) sebelumnya, yang menyimpulkan bahwa di masa depan negara-negara Timur Tengah yang

dilalui oleh Sungai Efrat dan Tigris berpotensi saling konflik untuk memperebutkan air bersih pada kedua sungai tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, ketidakseimbangan jumlah penduduk dan ketersediaan air berpotensi menjadi babak baru konflik global dan lokal pada abad ini. Sebagaimana bahan bakar minyak, sumber daya air juga tidak ada substitusinya. Selain itu, kekhawatiran global terhadap kelangkaan air juga karena adanya prediksi Gardner-Outlaw and Engelman (1997) bahwa pada tahun 2050 diprediksikan 1 dari 4 orang akan terkena dampak dari kekurangan air bersih.

Selama ini masyarakat miskin perkotaan telah menjadi korban ketidakadilan dalam akses terhadap air bersih. Air bersih yang harusnya menjadi benda atau barang publik, justru bagi kaum miskin perkotaan menjadi barang mewah. Bahkan dibandingkan dengan kalangan yang mampu, kaum miskin kota membayar lebih mahal. Pelanggan PDAM di perkotaan misalnya, hanya membayar air minum antara Rp7.000–Rp8.000 per m³. Sementara masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau masyarakat miskin harus membayar sekitar yakni Rp20.000 per m³ yang mereka beli dari pedagang air pikulan ataupun gerobak. Fenomena ini umum terjadi di wilayah yang air tanahnya sudah tercemar air laut (intrusi).

D. Kisah Sukses Kota Payakumbuh

Sudah saatnya, pengelolaan air bersih di perkotaan dilakukan secara integratif. Bank Dunia misalnya, memperkenalkan pendekatan manajemen air perkotaan terintegrasi (*integrated urban water management/IUWM*), di mana para pembuat kebijakan didorong untuk mengadopsi pandangan yang holistik, seperti apakah penggunaan air dan irigasi di hulu berdampak kepada ketersediaan dan kualitas air di hilir.

Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat menjadi contoh keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia. Karena prestasinya itu, kota ini mendapatkan anugerah Indonesia *Millennium Development Goals Awards 2011* kategori akses ke air minum layak dan sanitasi dasar. Sebagai daerah yang sangat peduli dengan air bersih

dan sanitasi, Payakumbuh mampu melampaui target pencapaian MDGs yang telah disepakati 190 negara anggota PBB, 2009 lalu. Akhir Desember 2011, cakupan pelayanan air bersih di Payakumbuh dari PDAM mencapai 93,4%. Padahal, target air bersih perkotaan dalam MDGs 2015 hanya 80%.

Dalam beberapa tahun terakhir, Payakumbuh di bawah Walikota Josrizal Zain berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan air minum dan sanitasi. Sejak 2006 Payakumbuh menjadi salah satu kota yang mengikuti program ISSDP (*Indonesia Sanitation Sector Development Program*). Di samping itu, Payakumbuh juga menjadi salah satu inisiator terbentuknya Aliansi Kota Peduli Sanitasi (AKOPSI).

Belajar dari pengalaman Kota Payakumbuh, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah lainnya di Indonesia, di antaranya: (1) Pengaturan pemanfaatan air tanah yang disertai dengan pengawasan yang ketat; (2) Pemberian surat IMB (izin mendirikan bangunan) harus disertai kewajiban penyediaan lahan terbuka; (3) Kewajiban memperbaiki kualitas dan mengembalikan tata guna air sesuai pemanfaatan sebagaimana yang telah dimanfaatkan oleh setiap pengguna air; (4) Setiap pengguna air harus diwajibkan membiayai pengadaan air bersih; dan (5) Setiap bangunan harus diwajibkan membuat sumur resapan sehingga dapat meningkatkan cadangan air tanah.

E. Penutup

Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi setiap individu manusia, terlebih yang tinggal di perkotaan yang dihadapkan pada ancaman kelangkaan air akibat ketidakseimbangan pembangunan. Krisis air ini disebabkan pertumbuhan penduduk, lemahnya pelayanan PDAM, dan pergantian musim yang kontras.

Data yang ada selama ini telah menunjukkan, sebagian kota-kota di dunia, khususnya di Indonesia sedang bergerak memasuki tahapan krisis sumber daya air. Perlu langkah-langkah persiapan dan pencegahan agar permasalahan ini ke depan dapat diminimalisasi. Bercermin dari keberhasilan kota Payakumbuh yang mendapatkan anugerah

Indonesia *Millennium Development Goals Awards 2011*, Pemerintah harus melakukan intervensi yang tegas dengan melakukan pengawasan pemanfaatan air tanah yang ketat, pembangunan, perbaikan kualitas dan tata guna air, mendorong pengguna air membiayai pengadaan air bersih dan mewajibkan pembuatan sumur resapan di setiap bangunan.

Dalam hal ini DPR RI dituntut untuk menjalankan fungsi pengawasannya untuk melindungi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 37 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang menyebutkan,

“air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.”

Rujukan:

1. Juha I. Uitto dan Asit K. Biswas. 2000. *Water for Urban Areas: Challenges and Perspectives*. Tokyo: United Nations University Press.
2. Clive Agnew and Philip Woodhouse. 2011. *Water Resources and Development*. Routledge: New York.
3. Erik Swyngedouw. 2004. *Social Power and the Urbanization of Water: Flow of Power*. Oxford University Press.
4. Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo. 2007. *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*. Jakarta: Niaga Swadaya.
5. Akhmad Solihin, “Bencana Kelangkaan Air di Perkotaan,” *Media Indonesia*, 17 Maret 2010.
6. Mulyawan Karim (editor). 2009. *Ekspedisi Ciliwung: Laporan Jurnalistik Kompas*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
7. Tom Gardner-Outlaw and Robert Engelman, *Sustaining Water, Easing Scarcity: A Second Update*. 1997. Washington DC: Population Action International – Population and Environment Program.
8. PDAM Provinsi DKI Jakarta, “Pemenuhan Kebutuhan Air Perpipaan Masyarakat Jakarta,” Makalah dalam Seminar Pembinaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Perkotaan di BPLHD Provinsi DKI Jakarta, 20 November 2012.
9. Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarief. 2010. *Tata Ruang Air*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
10. “Enam Bulan Pasokan Air Bersih Terganggu,” <http://regional.kompas.com>, diakses 9 April 2013.
11. “Krisis Air Belum Tertangani, Pedagang Air Kerepotan,” <http://regional.kompas.com>, diakses 9 April 2013.
12. “Krisis Air Baku di DKI Menanti Aksi Nyata,” <http://regional.kompas.com>, diakses 9 April 2013.
13. “Krisis Air Buah Kapitalisasi Pelayanan Air Bersih (Catatan Terkait Hari Air Sedunia 2013),” <http://www.globalmuslim.web.id>, diakses 9 April 2013.